

## **Religious Organization Capacity in Governing Social Distancing in Indonesia**

Maratun Saadah

Universitas Jambi, Indonesia

*corresponding author:* maratunsaadah@unja.ac.id

### **ABSTRACT:**

*This study aims to provide an analysis of the governance of social restriction policies by Islamic social organizations as an act of religious moderation and an effort to suppress the spread of the COVID-19 virus in Indonesia through a socio-religious perspective. The worship activities of the Muslim community are identical to gathering masses or congregations, the social intensity in these religious activities is a contradiction of government policies related to social distancing. This research is a descriptive qualitative research with literature study method. NU as the largest Islamic organization in Indonesia takes a role in administering social restrictions, including efforts to prevent the spread of other viruses. The steps taken by NU show how the Islamic organization has become the trust of the community and government partners in spreading the public agenda.*

### **ABSTRAK:**

*Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap kapasitas governansi kebijakan pembatasan sosial oleh organisasi kemasyarakatan islam dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia melalui perspektif soial keagamaan. Kegiatan ibadah masyarakat muslim identik dengan mengumpulkan massa atau berjamaah, intensitas sosial dalam kegiatan keagamaan ini merupakan kontradiksi dari kebijakan pemerintah terkait social distancing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. NU sebagai organisasi islam terbesar di Indonesia mengambil peran dalam melakukan governansi pembatasan sosial termasuk dengan upaya pencegahan penyebaran virus lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh NU menunjukkan bagaimana organisasi islam tersebut menjadi kepercayaan masyarakat dan mitra pemerintah dalam menyebarkan agenda publik.*

**Kata Kunci:** *Governansi, Nahdlatul Ulama; pembatasan social.*

### **ARTICLE HISTORY:**

Received: 2022

Accepted: 2022

Published: 1 Desember 2022

### **KEYWORDS:**

*Governance; Nahdlatul Ulama; social distancing.*

## PENDAHULUAN

Kegiatan peribadatan masyarakat muslim di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas yang melibatkan orang banyak, mulai dari yang wajib seperti salat berjamaah lima waktu dan salat jumat bagi laki-laki, hingga ibadah sunnah terutama selama bulan Ramadhan yaitu salat tarawih, tadarus Al-Quran, buka puasa bersama hingga khataman Al-Quran pada malam Nuzulul Quran. Selain itu, akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia menjadikan tradisi keagamaan di Indonesia kental dengan ritual tradisional, dan beragam jenisnya. Misalnya doa bersama yang dikemas dalam perayaan malam 1 Muharram dan 10 (Kurniawan, 2019). Selain itu, ada pula acara doa bersama dalam rangka menyambut bulan Ramadhan yang diikuti dengan makan bersama dalam satu wadah berupa nampang yang disebut sebagai *punggahan* atau *munggahan* (Ramadhani & Mohammad Abdoeh (2020). Tradisi bersilaturahmi keliling kampung dari rumah tetua adat hingga keluarga dan kerabat saat idul fitri menjadi hal yang tidak dapat diabaikan mayarakat.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia khususnya Satuan Tugas COVID dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di indonesia. Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat, memaksa Pemerintah di seluruh dunia untuk bekerja lebih cepat dari penyebaran virus. Setiap negara memiliki strategi yang berbeda untuk menghadapi penyebaran virus yang kemudian menjadi pandemi global. Negara seperti Tiongkok, (Su et al., 2020), Inggris (Ogden, 2020), Italia (Vaughan, 2020), Jerman (Müller et al., 2020) menerapkan karantina wilayah atau yang secara umum dikenal dengan *lockdown*, sebagai upaya meredam penyebaran virus, terlepas dari dampak ekonomi dan sosial yang besar. Implikasi ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja, meningkatnya pengangguran terbuka dan turunnya daya beli masyarakat hadir sebagai konsekuensi logis kebijakan *lockdown* (Correia et al., 2020).

Implikasi seperti inilah yang coba untuk dihindari oleh negara seperti Korea Selatan. Negara itu menanggulangi penyebaran virus dengan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*), dibanding dengan meniadakan sama sekali aktivitas sosial. Kebijakan ini diharapkan dapat tetap mengakomodasi kepentingan ekonomi dan sosial di negara tersebut. Langkah ini dilakukan pula oleh Pemerintah Indonesia, kebijakan dianggap sebagai solusi tepat sebagai



upaya meredam penyebaran virus sekaligus tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional (Herdiana, 2020).

Pembatasan sosial mengharuskan adanya pembatasan kegiatan masyarakat pada skala tertentu, aktifitas publik seperti sekolah, kegiatan pemerintahan, jual beli masyarakat, termasuk kegiatan ibadah sehari – hari. Melalui Peraturan Pemrintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus, Pemerintah menganjurkan umat beragama untuk beribadah dirumah saja. Setiap umat beragama diharuskan menjalankan ibadah di rumahnya masing-masing. Kegiatan ibadah dirumah ini didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan ibadah dimasa COVID-19.

Pada bulan Mei 2020, Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan anjuran tentang ketentuan ibadah di masa Pandemi untuk yang pertama kali. Anjuran tersebut menyatakan bahwa ibadah keagamaan seharusnya dilakukan dengan memenuhi serangkaian protokol Kesehatan. Sebelum adanya himbauan ini, masyarakat Indonesia belum memiliki pedoman khusus dalam melaksanakan aktifitas ibadah yang melibatkan banyak orang. Sehingga tidak jarang pelanggaran pembatasan jarak terjadi. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Jambi dalam menerapkan kebijakan *social distancing* di Indonesia.

Sebagai sebuah kebijakan baru, tentu saja kebijakan *social distancing* sendiri telah menjadi fokus kajian dari pelbagai disiplin ilmu baik sudut pandang kesehatan masyarakat (Yanti et al., 2020) yang melihat peran *social distancing* dalam penyebaran virus, hingga dampak kebijakan tersebut pada aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Kecanduan bermain games misalnya (Siste et al., 2020), atau pada kegiatan belajar mengajar (Syarifudin, 2020) dan tentunya pada kehidupan beragama (Bagir et al., 2020). Adapun penelitian yang melihat hubungan antara agama Islam dan pandemi paling tidak bertujuan mengkaji pandangan agama terhadap pandemi (A., 2020; Alkaf, 2020) peran agama aktor agama dalam penanganan pandemi (Aula, 2020; Arrobi & Nadzifah, 2020; Mushodiq & Imron, 2020) dan juga melalui ibadah seperti Zikir (Ulfiah et al., 2020)). Ada peneliti yang sudah menyinggung hubungan antara kegiatan ibadah selama pandemi, yakni terkait bagaimana fatwa ibadah dalam masa pandemi (Rusyana et al., 2020) dan juga respon raham masyarakat sesuai

pengaruh teologis yang dianutnya (Hidayah, 2020), namun belum melihat sampai pada bagaimana kemudian eksistensi ritual keagamaan tersebut yang merupakan akulturasi budaya dan sarat akan pengumpulan massa menjadi suatu tantangan tersendiri dalam penerapan *social distancing*.

Laporan mendetail disusun oleh Akmal Salim Ruhana dan Haris Burhani, peneliti dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa justru masyarakat yang merasa abai terhadap himbauan untuk beribadah dirumah saja adalah mereka yang berada pada Zona Merah Pandemi (Ruhana & Burhani, 2020). Fakta ini menjadi menarik untuk dielaborasi mengingat kegiatan beribadah masyarakat muslim Indonesia sangat khas dengan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Terlebih pada masa pandemi, masyarakat cenderung untuk merefleksi kembali eksistensi kehidupan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terjadi peningkatan kegiatan ibadah di seluruh dunia (Bentzen, 2021).

Hal ini seolah berbanding terbalik dengan hasil survei terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam penanganan pandemi yang terus turun sepanjang tahun 2020. Pada tahap ini tentu saja kehadiran organisasi kemasyarakatan islam menjadi sentral untuk mengambil peran. Organisasi tersebut dapat mendukung pemerintah melalui intervensi pada sektor kesehatan masyarakat dan memastikan partisipasi serta akuntabilitas terhadap masyarakat yang mungkin memiliki resiko dan terkena dampak pandemi. Dalam kajian administrasi publik, keterlibatan ini disebut dengan governansi, dan kemampuan organisasi kemasyarakatan untuk terlibat dalam kebijakan publik disebut dengan kapasitasi governansi(Graham & Fortier, 2006).

Selama pandemi COVID-19 di Indonesia, Ormas Keagamaan Islam memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran pandemi. Virus ini dengan mudah menyebar acara seperti pertemuan massal yang menjadi ciri dari ritual keagamaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Akibatnya, organisasi Islam harus mengatur pengikutnya untuk melakukan sholat di rumah untuk menghindari keramaian dan mempromosikan jaga jarak fisik. Sayangnya, ada anggapan terkait kepercayaan keagamaan yang menyatakan bahwa takut kepada selain Tuhan, termasuk takut kepada virus COVID-19, merupakan



penyimpangan dari iman, yang membuat masyarakat tidak melakukan tindakan pencegahan selama pandemic (Muhtada, 2020).

Peran penting Ormas Islam semakin kuat ketika persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin rendah (Harapan et al., 2020). Ormas dalam hal ini mengedukasi masyarakat untuk semakin menerima vaksin. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar yang didirikan sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Nahdlatul Ulama memiliki 25 juta pengikut membuat jumlah pengikut organisasi ini sangat besar dan tersebar luas di seluruh negeri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang kekuatan dan tantangan yang dihadapi kedua lembaga tersebut dalam menjalankan program dan kegiatannya untuk mengatasi COVID-19.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif yang berfokus pada eksplorasi governansi Ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dalam penerapan pembatasan sosial di masa pandemi. Selanjutnya, teknik yang sama digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah dalam konteks kehidupan nyata dan data dikumpulkan selama pandemi COVID-19 antara Mei 2020 dan Desember 2020.

Penelitian ini akan membahas terlebih dahulu tentang kondisi sosial kegamaan masyarakat muslim di Indonesia yang kemudian menjadikan tantangan tersendiri bagi pelaksana kebijakan. Selanjutnya penelitian ini akan mengeksplor bagaimana kapasitas governansi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sebagai Ormas Islam dengan pengikut terbesar di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembatasan Sosial di Indonesia

Tidak ada satu negara pun yang siap dengan pandemi, namun birokrasi dituntut untuk bekerja lebih cepat dari pada penyebaran virus (Saadah, 2021). Tidak heran ketika kemudian banyak peneliti memfokuskan kajian pada pemerintah terkait penanganan pandemi, mulai dari proses pelayanan publik (Doramia Lumbanraja, 2020) kemampuan birokrasi (Arsyad, 2020) tinjauan pada pesta demokrasi ditengah pandemi (Kholis, 2020), hingga kebijakan-

kebijakan dalam penanggulangan pandemi (Tuwu, 2020) (Muis, 2020) hingga pada kajian tentang efektifitas kebijakan *social distancing* sebagai pilihan pemerintah disbanding dengan kebijakan menutup wilayah (*lockdown*) (Ristyawati, 2020).

Kontroversi kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia telah terjadi bahkan sebelum Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan apa yang akan diterapkan. Sebagian masyarakat memuji kebijakan penguncian wilayah atau yang lebih dikenal dengan *lockdown*, banyak wilayah-wilayah mulai dari yang paling kecil yakni Rukun Tetangga (RT) hingga tingkat Kota melakukan karantina mandiri. Sebagian lain masyarakat menganggap karantina mandiri justru tidak tepat, mengingat perekonomian masyarakat yang banyak ditopang oleh sector informal.

*Social distancing* sendiri sudah diperkenalkan sebelum Pandemi COVID-19 merebak, sebagai tanggapan terhadap pandemi yang pernah terjadi sebelumnya, yakni Flu Spanyol. Dalam *buku Social Distancing, Quarantine, and Isolation*, Huremovic beranggapan bahwa metode yang paling krusial dalam memutus rantai infeksi adalah pemisahan yang efektif terhadap orang yang terinfeksi dan suspek pembawa virus terhadap populasi yang belum terinfeksi (Huremović, 2019). Salah satu cara untuk mencapai pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme jaga jarak sosial atau *social distancing*, yang merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi kontak termasuk pula isolasi dan karantina bagi pasien pengidap virus.

Social Distancing adalah praktik mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit dengan memperluas jarak antar manusia (Sen-Crowe et al., 2020). Paling tidak berikut ini adalah cara yang tidak terlalu drastic namun juga cukup efektif dan lebih sering digunakan sebagai cara teknis *social distancing* yaitu; pembatalan kegiatan yang mengumpulkan massa (Ishola & Phin, 2011), penutupan sekolah (Chowell et al., 2011), penutupan tempat kerja (Rousculp et al., 2010), pembatasan perjalanan (Huremović, 2019). Di Indonesia, pembatasan sosial tersebut juga dilakukan pada kegiatan beribadah, mengingat masyarakat muslim Indonesia.



## Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia

Kegiatan ibadah masyarakat muslim identik dengan mengumpulkan massa atau berjamaah, intensitas sosial dalam kegiatan keagamaan ini merupakan kontradiksi dari kebijakan pemerintah terkait *social distancing* (Nawi, Ahmad Thariki & Zainuddin, 2016). Islam menganjurkan ibadah secara berjamaah dan mewajibkan bagi laki-laki untuk berjamaah di rumah ibadah (Siregar, 2016), diikuti dengan praktik merapatkan barisan salat dalam ibadah salat berjamaah (Syahid, 2020). Selain dalam kegiatan ibadah, anjuran islam untuk menjaga silaturahmi erat pula dengan budaya bersalaman tangan (Hermanto, 2019). Bersalaman tangan telah menjadi nilai yang begitu kental di masyarakat Indonesia secara umum, menjadi nilai karakter bangsa (Sawaludin & Salahudin, 2018).

Selain itu, masuknya Islam secara damai dengan negosiasi menghadirkan akulturasi budaya antara ajaran islam dan budaya lokal masyarakat. Akulturasi antara budaya dan agama tersebut terjadi hampir diseluruh nusantara mulai dari Aceh (Arifin, 2016), Jepara (Widiana, 2017), Pekalongan (Rosidin, 2017), Semarang (Yusof & Kastolani, 2016), Surakarta (Bakri & Muhadiyatiningssih, 2019), Bugis (Wekke, 2013), dan Sambas (Mun'in & Mun'in, 2017). Akibatnya, tradisi keagamaan muslim di Indonesia sangat kental dengan unsur budaya, seperti misalnya mandi balimau dari Sumatera Barat (Iballa, 2016), Kenduri Sko dari Masyarakat Kerinci (Helida, 2016), Ritual Garebeg Syawal di Yogyakarta (Kuncoro, 2018), Ritual Tolak Bala di Palalawan (Hasbullah et al., 2017) dan banyak lainnya. Ritual tersebut identik dengan perkumpulan dan membutuhkan hadirnya banyak masyarakat (Zuhdi, 2017) (Sulistyoko & Hafidzi, 2020) (Susanto, 2016) (Amri & Maharani, 2018).

Akulturasi Islam dengan budaya lokal merupakan akibat dari dakwah masuknya islam yang mengakomodir kebudayaan lokal tersebut (Setyaningsih, 2020) (Zuhdi, 2017) (Zuhdi, 2017) (Aziz, 2015) (Sumbulah, 2012) (Al-Amri & Haramain, 2017) (Junaid, 2013) (Prasetyawati & Asnawi, 2018). Kebudayaan tersebut dapat terwujud pada ritual keagamaan maupun benda seperti Batik (Parmono, 2013), fisik bangunan Masjid (Hakim, 2011) dan rumah (Hidayat et al., 2020), tak benda seperti nama bangunan (Wardoyo & Sulaeman, 2017), dan ritual pernikahan (Isnaeni & Hakiki, 2017) (Pala, 2020).

Misalnya tradisi Ziarah yang ada pada masyarakat Ponorogo sebagai warisan budaya para pendahulu (Wahid et al., 2018), ada pula Ziarah Kubro pada masyarakat Palembang yang dilakukan untuk mendoakan para ulama yang menyebarkan Agama Islam disana (Amri & Maharani, 2018). Rumah Bari merupakan rumah panggung yang sudah berusia ratusan tahun yang memiliki peran penting dalam pembacaan Burdah, aktivitas pembacaan burdah pada masyarakat Palembang selalu dilakukan pada rumah panggung yang telah berusia ratusan tahun tersebut. Kemudian para peziarah yang telah berkumpul selanjutnya menuju ke pemakaman para ulama serta auliya yang ada di Palembang yang berguna untuk ziarah kubur. Ziarah kubur ke pemakaman para ulama ini dilakukan secara berjenjang selama tiga hari berturut-turut.

Ritual Tolak Balak atau mengobati kampung pada masyarakat melayu di Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan agar terhindar dari bencana (Hasbullah et al., 2017). Faktor Islam ditambahkan sedemikian rupa dalam ritual ini yang dibungkus dengan metode kenduri tolak bala. ritual tolak bala menggabungkan faktor Islam, Hindu, animisme, serta dinamisme. Perihal ini nampak dengan jelas dari terdapatnya persembahan serta pembacaan mantra yang diperuntukan buat menemukan dorongan dari makhluk halus. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Madura, dimana ada tradisi peninggalan Waliullah yakni Tembhong Macapat yang dilakukan sebagai doa untuk memohon keselamatan (Susanto, 2016).

Ritual Kenduri sepertinya berkembang cukup baik dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Ada pula perhelatan kenduri sko yang dilakukan dengan mengundang 'orang gunung' sebagai sebuah pesan kebudayaan (Helida, 2016). Begitu pula dengan tradisi mandi limau di Riau, penelitian Kahfi (Iballa, 2016) menunjukkan bahwa tradisi tersebut merupakan living hadis dan bukti sejarah islamisasi awal yang ada di Nusantara secara umum dilakukan secara damai dan merangkul. Begitu pula dengan yang terjadi di Yogyakarta, penlitian tentang ritual garebeg di Keraton Yogyakarta (Kuncoro, 2018) menunjukkan bahwa ritual ini melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada pada struktur sosial masyarakat Yogyakarta melalui 7 prosesi yakni Tumplak Wajik, Yasa Pareden, Gladen, Garebeg Pareden, Ngabekten, Sekaten dan Garebeg Mulud Dal.



Bahkan dalam perayaan pernikahan misalnya, tradisi kegamaan juga erat dengan unsur budaya. Penelitian tentang tradisi maantar misalnya, menunjukkan bahwa pemberian mahal dalam ajaran Agama Islam disesuaikan sedemikian rupa dengan tradisi kehidupan masyarakat Banjar (Sulistyoko & Hafidzi, 2020)

Pada hari-hari biasa, ritual keagamaan seperti ini sangat baik untuk dilaksanakan dan perlu untuk terus dilestarikan. Ajaran agama yang penuh nilai budaya menjadi warna dan penangkal aliran-aliran yang bersifat radikal dan destruktif (Mahmuddin, 2018). Namun, di masa awal pandemi menyebar di Indonesia, Pemerintah memberikan himbauan untuk melaksanakan ibadah di rumah saja. Segala jenis kegiatan yang mengumpulkan massa diimbau untuk ditiadakan. Hal ini menjadi dilema tersendiri dikalangan masyarakat muslim di Indonesia. Disatu sisi, Pemerintah mengimbau seluruh umat beragama untuk beribadah dirumah saja, menghindari dan tidak membuat kerumunan.

Dalam kajian kebijakan publik, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah kondisi sosial masyarakat. Sebagai Negara dengan jumlah mayoritas penduduk beragama islam, faktor sosial keagamaan pada masyarakat menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam setiap kebijakan. Posisi agama ini seharusnya ditempatkan secara sejajar dengan formasi opini dan aspirasi politis lainnya (Noor, 2016). Isu-isu keberpihakan pemerintah terhadap agama dalam sebuah kebijakan, misalnya kebijakan terkait pemberian izin kepada tempat hiburan malam yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak sensitif terhadap ‘perasaan’ umat muslim. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan praktik ibadah menjadi hal yang sangat sentral, seperti kebijakan sosial distancing yang dalam penerapannya menghadirkan pro-kontra di kalangan masyarakat muslim.

Teori klasik tentang kebijakan publik yang digagas oleh Thomas R Dye menyatakan bahwa ‘Kebijakan adalah segala yang pemerintah pilih untuk dilakukan maupun tidak’(Dye, 2017), rasanya sudah tidak relevan lagi. Definisi ini memandang kebijakan hanya sebagai titah dan keinginan pemerintah semata, sementara paradigma administrasi publik dewasa ini sudah mengakomodasi partisipasi masyarakat dengan segala bentuk mekanisme. Ketika baru pertama kali diperkenalkan oleh Denhard bersaudara (Denhardt & Denhardt, 2000), konsep administrasi gaya publik baru menjadi kritik terhadap paling tidak dua paradigma *mainstream* lama, *Old Public Administration* dan *New*

*Public Management* (Robinson, 2015). Konsep ini mengawali perubahan cara pandang negara terhadap pemerintahan yang demokratis untuk mengakui posisi warga negara, terutama partisipasi kelompok masyarakat.

Berawal dari pemikiran ini, maka kebijakan publik sudah seharusnya tidak hanya mengakomodasi tidak kepentingan masyarakat dan mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang ada dalam masyarakat, namun juga melibatkan seluruh komponen negara dalam pelaksanaannya (Van Meter & Van Horn, 1975). Hal ini juga diamini oleh Sabatier dan Mazmanian, menurut mereka kondisi sosial masyarakat menjadi penentu dalam implementasi kebijakan (Sabatier & Mazmanian, 1980). Lebih lanjut, pendekatan governansi dapat digunakan sebagai perspektif untuk mengukur kapasitas institusi negara maupun non negara. Saat ini, bahkan komponen governansi sudah jauh berkembang tidak lagi pada aktor tapi juga melibatkan ‘nilai’ dan ‘norma’ seperti kearifan lokal, kekuatan, daya tawar dan modal sosial yang kemudian dapat digunakan untuk melihat peran ‘nilai’ tersebut dalam penerapan pembatasan sosial.

### Kapasitas Governansi Nahdatul Ulama

Penerapan kebijakan publik dewasa ini tidak lagi didominasi oleh pemerintah sebagai aktor utama, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam agenda publik merupakan suatu keharusan. Dalam pendekatan administrasi publik, mekanisme pelibatan ini disebut sebagai *governance* yang kemudian dalam serapan Bahasa Indonesia disebut sebagai governansi. Faktanya, negara dengan indikator governansi yang tinggi menunjukkan performa yang lebih baik dalam mengatasi pandemi dibanding dengan negara dengan performa governansi yang lebih rendah (Kaufmann, 2020).

Selama pandemi COVID-19, langkah-langkah pembatasan sosial telah direkomendasikan oleh pemerintah terutama dibidang kesehatan masyarakat untuk memperlambat penyebaran virus. Hal ini termasuk menjaga jarak setidaknya enam kaki dari orang lain, memakai masker, dan membatasi jumlah orang yang berkumpul di satu tempat. Sebagai bagian dari aktor governansi, organisasi keagamaan telah didorong untuk mengikuti pedoman ini untuk menjaga agar jamaah mereka tetap aman. Beberapa organisasi keagamaan melangkah lebih jauh. Organisasi keagamaan tersebut tidak hanya beradaptasi



namun juga berinovasi dengan menawarkan layanan ibadah secara online, pelayanan keagamaan melalui undangan, atau kegiatan tatap muka dengan jumlah jamaah yang lebih kecil.

Pemerintah Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan himbauan terkait jaga jarak dalam kegiatan ibadah pada 14 Maret 2020. Himbauan ini diteruskan oleh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dengan mengeluarkan instruksi pada 25 Maret 2020, fatwa tersebut mengimbau anggota untuk melakukan *physical distancing*, yaitu dengan tidak mengadakan rapat atau perkumpulan yang mengumpulkan banyak orang, termasuk tilawah dan salat berjamaah, seminar, dan kegiatan lainnya (Rachmawati et al., 2022). Kemampuan governansi NU dalam mengakomodir kebijakan tidak hanya dengan menyebarluaskan kebijakan yang ada namun dengan mengeluarkan kebijakan serupa yang lebih teknis.

Selain itu, dalam rangka pencegahan primer terhadap COVID-19, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh NU dalam seperti mengedukasi dan membimbing masyarakat khususnya jamaah dan anggota mengenai penularan penyakit melalui himbauan langsung maupun secara daring. Organisasi tersebut membuat panduan praktis bagi para pengikutnya mengenai kegiatan ibadah sehari-hari selama pandemi COVID-19. Misalnya, pada fase awal pandemi di Indonesia, Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama mengeluarkan protokol dan instruksi penanggulangan pandemi.

Pemberian instruksi kepada anggotanya yang menekankan bahwa kegiatan ibadah harus meminimalkan kontak fisik dan kerumunan adalah upaya substansial untuk membimbing pengikut organisasi untuk berdoa dari rumah selama pandemi. Ketua Ormas Islam tersebut menyatakan bahwa setiap umat Islam perlu menjaga diri dan lingkungannya agar tidak terjerumus ke dalam kebinasaan, dan ibadah berjamaah seperti tajwid, salat Jumat, dan salat Idul Fitri dianjurkan dilakukan di rumah dan tidak berjamaah. jika mereka berada di daerah dengan penularan COVID-19 yang tinggi.

Selanjutnya, pada tahun 2020 telah dibuat lebih dari 40 pedoman tentang penanganan covid. Pedoman dan materi yang diberikan oleh unit khusus NU dalam penanganan COVID-19 ini bermanfaat, sebagaimana dibuktikan oleh salah satu pengelola sekolah yang menerima pendidikan ini

menyatakan bahwa proses itu sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan, terutama dalam mencegah penyebaran pandemi.

Kajian ini juga menemukan bahwa salah satu pesan kritis yang disebarluaskan NU adalah pentingnya pencegahan COVID-19 sebagai bentuk penyelamatan nyawa dan bukan sebagai bentuk ketakutan terhadap makhluk (dalam artian merusak iman). Nilai ini erat kaitannya dengan kapasitas governansi Hal itu ditegaskan oleh para pemuka NU mengingat berkembangnya pemikiran di masyarakat bahwa tidak perlu takut dengan COVID-19 dan umat beragama hanya perlu takut kepada Tuhan dan pasrah saja pada takdirnya.

Banyak pengikut NU yang kemudian juga ikut serta dalam mengkomunikasikan pesan yang difatwakan oleh NU. Apalagi jika anggota dan peserta ormas tersebut mematuhi himbauan yang dikeluarkan pimpinan, hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi COVID-19. Dalam proses pencegahan penyebaran pandemi, masyarakat sangat berperan penting terutama untuk penerapan *physical distancing*, penggunaan masker, dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap imbauan yang disuarakan pimpinan organisasi dalam mendorong perilaku preventif untuk meminimalisir penularan COVID-19 menjadi penting.

Organisasi tersebut juga mengadakan diskusi online secara rutin melalui aplikasi media sosial mereka dan konferensi video untuk membahas cara mencegah penularan virus dan meminimalkan dampak COVID-19 ketika seseorang terinfeksi, seperti kerugian ekonomi, masalah ketahanan keluarga, vaksinasi, dan stigma masyarakat terhadap penyintas covid. NU memiliki media sosial dengan jumlah pengikut yang besar, hal ini menyiratkan bahwa saluran komunikasi mereka dapat menjangkau khalayak yang besar.

Selain itu, NU juga menyediakan layanan konsultasi via telepon untuk konseling psikologis dan sosial yang dikelola oleh psikolog, akademisi mislim, dan pakar Kesehatan. Layanan ini dapat diperoleh tanpa pembatasan atau syarat tertentu bagi masyarakat luas. Menariknya, laporan mereka menyatakan bahwa lebih dari dua ribu orang telah menggunakan layanan konsultasi ini. Selain itu, NU juga mengembangkan aplikasi telepon seluler yang berfungsi untuk mendeteksi risiko penularan COVID-19 dan memberikan materi edukasi yang memadai tentang pencegahan dan pengendaliannya.



Kemudian, NU juga menyelenggrakanb berbagai bentuk edukasi dan penyampaian informasi terkait COVID-19 yang dilakukan secara online untuk meminimalisir kontak langsung. Hal ini disinyalir menjadi faktor risiko penularan paling tinggi dari penyakit tersebut. Sebab, berbeda dengan bencana lain yang hanya didasarkan pada letak geografis dan umumnya berdampak pada wilayah yang terbatas, kelompok sasaran COVID-19 lebih luas secara geografis, dan jumlah yang terkena dampak lebih banyak, termasuk pula tim pengendalian, tenaga Kesehatan dan semua orang. Selain itu, daerah yang terkena dampak melebihi dari bencana lainnya, dan cakupannya menyebar ke seluruh Indonesia.

NU juga merekrut ribuan relawan di berbagai posko Covid-19 yang tersebar di 300 kabupaten/kota, semuanya telah dilatih dan disalurkan ke posko yang mendistribusikan bantuan seperti sabun cair, masker, dan hand sanitizer serta memberikan penyuluhan kesehatan. Oleh karena itu, anggota NU tidak hanya menjadi objek dalam proses pendidikan kesehatan, tetapi program pelatihan memungkinkan mereka menjadi agen yang menyebarluaskan informasi tentang COVID-19 dan vaksinasi kepada kerabat mereka. Selain itu, struktur organisasi yang menjangkau hingga ke akar rumput memungkinkan mereka untuk secara langsung menerapkan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tingkat masyarakat.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan satu hal, yaitu masyarakat Indonesia mempercayai ormas islam. Tidak heran jika kemudian the World Development Report secara global menyerukan peran serta dari organisasi nonpemerintah (LSM), terutama organisasi berbasis agama untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengisi kesenjangan yang ada dalam layanan kesehatan. Karena ormas Islam seringkali merupakan penyedia layanan kesehatan yang paling dihormati dan dipercaya dalam komunitas. Selain itu, satu penelitian menunjukkan bahwa kelompok agama adalah pemain penting dalam pemberian layanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau dan pedesaan, pemerintah tidak dilayani secara memadai (Widmer et al., 2011).

Berdasarkan fakta tersebut diyakini bahwa organisasi keagamaan berperan penting dalam penyelenggaraan negara atau masyarakat, karena dapat mendorong stabilitas, toleransi, dan perdamaian. Ketika para pemimpin dan institusi agama mempromosikan moderasi, mereka dapat membantu mencegah radikalisisasi, ekstremisme, dan kekerasan. Hal ini dapat membantu

menciptakan lingkungan kepercayaan, kerja sama, dan saling menghormati di antara kelompok agama dan etnis yang berbeda.

Governansi dari organisasi ini ternyata didorong oleh semangat moderasi beragama yang menjadi landasan mereka dalam bergerak. Hal ini ternyata dapat membantu memastikan bahwa pemerintah inklusif dan menghormati hak-hak semua warga negara terlepas dari keyakinan agama mereka. Hal ini juga dapat membantu mempromosikan tata pemerintahan yang baik dengan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Selain itu, moderasi beragama dapat membantu memperkuat peran masyarakat sipil dalam mempromosikan dialog, pemahaman, dan kerja sama antara kelompok agama dan etnis yang berbeda.

Terlepas dari bagaimana Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir telah dengan penuh dinamika memperdebatkan moderasi beragama Melalui soft power, Kementerian Agama telah menjalankan inisiatif moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Tahun 2019 telah dicanangkan sebagai Tahun Moderasi Beragama. Salah satu dari Tujuh Program Prioritas Kemenag 2022 yang ditetapkan sebagai Tahun Toleransi adalah moderasi beragama.

Nyatanya, kapasitas governansi organisasi keagamaan banyak didukung oleh hidupnya moderasi beragama dalam organisasi ini. Moderasi beragama dan jarak sosial dapat berjalan seiring selama pandemi COVID-19, karena keduanya ditujukan untuk mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Prinsip moderasi beragama dari NU terbukti mampu mendorong orang mengikuti pedoman kesehatan masyarakat dan mempraktikkan jarak sosial untuk memperlambat penyebaran virus. Pemimpin agama dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pengikutnya mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain, seperti memakai masker dan menjaga jarak aman dari orang lain. Mereka juga dapat mendorong penggunaan layanan virtual atau online untuk terus mempraktikkan agama sambil tetap mematuhi langkah-langkah jarak sosial. Klaim ini perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait bagaimana hubungan prinsip moderasi beragama dalam membentuk kapasitas governansi organisasi keagaman.



## SIMPULAN

Organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama memainkan peranan penting selama fase awal adaptasi dan pengendalian COVID-19 melalui penerapan pembatasan sosial di Indonesia. NU berperan dalam mengelola wabah tersebut dengan berkontribusi dalam penerapan kebijakan pembatasan sosial, termasuk berinovasi dalam pelayanan jamaah. NU sebagai organisasi islam terbesar di Indonesia mengambil peran dalam melakukan governansi pembatasan sosial. Langkah-langkah yang dilakukan oleh NU menunjukkan bagaimana organisasi islam tersebut menjadi kepercayaan masyarakat dan mitra pemerintah dalam menyebarkan agenda publik.

## REFERENSI

- A, M. T. (2020). Nalar Agama dan Pandemi Covid-19. *Prosiding, Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19 "Membangun Optimisme Di Tengah Pandemi Covid-19."*
- Al-Amri, L., & Haramain, M. (2017). Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan.* <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>
- Alkaf, M. (2020). Agama, Sains, Dan Covid-19: Perspektif Sosial-Agama. *MAARIF.* <https://doi.org/10.47651/mrfv15i1.79>
- Amri, P., & Maharani, S. D. (2018). Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler. *Jurnal Filsafat.* <https://doi.org/10.22146/jf.36054>
- Arifin, M. (2016). Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh. *Islam Futura.*
- Arrobi, M. Z., & Nadzifah, A. (2020). Otoritas Agama di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi? *MAARIF.* <https://doi.org/10.47651/mrfv15i1.85>
- Arsyad, M. (2020). Mantra Hitam Proses Pelayanan Publik: Menyoal Eksistensi Negara di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Nasional Covid-19.*
- Aula, Si. K. N. (2020). Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses.*
- Aziz, D. K. (2015). Akulturasi islam dan budaya jawa. *Fikrah.*
- Bagir, Z. A., Asfinawati, Suhadi, & Arianingtyas, R. (2020). Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices. *Religion and Human Rights.* <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>
- Bakri, S., & Muhamadiyatningsih, S. N. (2019). Tradisi Malam Selikuran Kraton Kasunanan Surakarta. *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya.* <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1753>

- Bentzen, J. S. (2021). In crisis, we pray: Religiosity and the COVID-19 pandemic. *Journal of Economic Behavior and Organization*. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.10.014>
- Chowell, G., Echevarría-Zuno, S., Viboud, C., Simonsen, L., Tamerius, J., Miller, M. A., & Borja-Abrutví, V. H. (2011). Characterizing the Epidemiology of the 2009 Influenza A/H1N1 Pandemic in Mexico. *PLoS Medicine*. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000436>
- Correia, S., Luck, S., & Verner, E. (2020). Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3561560>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Doramia Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy*.
- Graham, J., & Fortier, E. (2006). Building Governance Capacity: the Case of Potable Water in First Nations Communities. *Aboriginal Policy Research: Moving Forward, Making a Difference*.
- Hakim, A. (2011). Akulturasi Budaya Bangunan Masjid Tua Cirebon. *Suhuf*.
- Harapan, H., Wagner, A. L., Yufika, A., Winardi, W., Anwar, S., Gan, A. K., Setiawan, A. M., Rajamoorthy, Y., Sofyan, H., & Mudatsir, M. (2020). Acceptance of a COVID-19 Vaccine in Southeast Asia: A Cross-Sectional Study in Indonesia. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00381>
- Hasbullah, H., Toyo, T., & Awang Pawi, A. A. (2017). Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Ushuluddin*. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2742>
- Helida, A. (2016). Perhelatan kenduri sko sebagai sebuah pesan kebudayaan masyarakat Kerinci di taman nasional Kerinci Seblat. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/mkp.v29i12016.34-43>
- Herdiana, D. (2020). Social Distancing: Indonesian Policy Response to the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.555>
- Hermanto, H. (2019). Penanaman Nilai-Nilai Islam dalam Membentuk Sopan Santun Anak di Raudlatul Athfah Yayasan Nurul Bahra Kabupaten Bone. *AN-NISA*. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i1.450>
- Hidayah, N. (2020). Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas Wabah Corona di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15365>



- Hidayat, M., Prayitno, B., & Ratmi, D. H. (2020). Akulturasi religi dalam arsitektur vernakular rumah Melayu Pontianak. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*. <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.405>
- Huremović, D. (2019). Social Distancing, Quarantine, and Isolation. In *Psychiatry of Pandemics*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-15346-5\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-030-15346-5_8)
- Iballa, D. K. M. (2016). Tradisi Mandi Balimau di Masyarakat Kuntu: Living Hadis Sebagai Bukti Sejarah. *Jurnal Living Hadis*. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1122>
- Ishola, D. A., & Phin, N. (2011). Could influenza transmission be reduced by restricting mass gatherings? Towards an evidence-based policy framework. In *Journal of Epidemiology and Global Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jegh.2011.06.004>
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2017). Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *KALAM*. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>
- Junaid, H. (2013). Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal. *Jurnal Diskursus Islam*.
- Kaufmann, D. (2020, July 10). What the pandemic reveals about governance, state capture, and natural resources. <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/07/10/what-the-pandemic-reveals-about-governance-state-capture-and-natural-resources/>
- Kholis, N. (2020). Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik. [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id).
- Kuncoro, Y. A. (2018). Komunikasi Ritual Garebeg di Keraton Yogyakarta. *Jurnal Aspikom*. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.189>
- Kurniawan, S. (2019). Komunikasi Ritual Suroan pada Masyarakat Suku Jawa di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*. <https://doi.org/10.29300/syr.v19i2.2467>
- Mahmuddin, M. (2018). Religion, Radicalism and National Character: In Perspective of South Sulawesi Local Wisdom. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.14421/esensia.v18i2.1481>
- Muhtada, D. (2020). Religion and COVID-19 mitigation. *The Jakarta Post*.
- Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Müller, O., Lu, G., Jahn, A., & Razum, O. (2020). COVID-19 control: Can germany learn from China? *International Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.78>
- Mun'in, F., & Mun'in, F. (2017). Eksistensi Tradisi Pembacaan Assalai/Asy'rakal Dan Makan Besaprah Pada Pesta Pernikahan Masyarakat Melayu Kabupaten Sambas Perspektif Ekonomi Islam. *Khatulistiwa*.
- Mushodiq, M. A., & Imron, A. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>



- Nawi, Ahmad Thariki, & Zainuddin, C. S. (2016). Muafik Dan Masbuk : Satu Analisis Fiqh dan Maqasid As Shariah. *Prosiding, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016*.
- Noor, I. (2016). Identitas Agama, Ruang Publik dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.18592/jiu.v1i1.733>
- Ogden, R. S. (2020). The passage of time during the UK Covid-19 lockdown. *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235871>
- Pala, S. (2020). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai , Sulawesi Selatan. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v9i1.255>
- Parmono, K. (2013). Nilai Kearifan Lokal Dalam Batik Tradisional Kawung. In *Jurnal Filsafat*, 23(2): 134–146). <https://doi.org/10.22146/jf.13217>
- Prasetawati, E., & Asnawi, H. S. (2018). Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Indonesia. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. <https://doi.org/10.25217/jfv3i1.283>
- Rachmawati, E., Umniyatun, Y., Rosyidi, M., & Nurmansyah, M. I. (2022). The roles of Islamic Faith-Based Organizations on countermeasures against the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Helyon*, 8(2), e08928. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2022.E08928>
- Ramadhani, S. A. Z., & Mohammad Abdoeh, N. (2020). TRADISI PUNGGAHAN MENJELANG RAMADHAN (Studi di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang). *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(1), 51–65. <https://doi.org/10.31538/ALMADA.V3I1.495>
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Robinson, M. (2015). From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. UNDP Global Centre for Public Service Excellence.
- Rosidin, R. (2017). Tradisi Lopis Raksasa dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekalongan. *Al-Ulum*. <https://doi.org/10.30603/au.v16i1.24>
- Rousculp, M. D., Johnston, S. S., Palmer, L. A., Chu, B. C., Mahadevia, P. J., & Nichol, K. L. (2010). Attending work while sick: Implication of flexible sick leave policies. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*. <https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e3181f43844>
- Ruhana, A. S., & Burhani, H. (2020). Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Menghadapi Covid-19. In *Program Majelis Reboan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*. [https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1592454380Laporan\\_UmatVSCovid\\_.pdf](https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1592454380Laporan_UmatVSCovid_.pdf)



- Rusyana, A. Y., Supriyadi, D., Khosim, A., & Nugroho, F. H. (2020). Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir. *Unpublished*. Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saadah, M. (2021). Artificial Intelligence for Smart Governance; towards Jambi Smart City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1), 012030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012030>
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation Of Public Policy: A Framework Of Analysis. *Policy Studies Journal*. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Sawaludin, S., & Salahudin, M. (2018). Nilai-Nilai Karakter Bangsa Dalam Tradisi Tari Caci Di Masyarakat Manggarai Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31764/civicus.v4i2.341>
- Sen-Crowe, B., McKenney, M., & Elkbuli, A. (2020). Social distancing during the COVID-19 pandemic: Staying home save lives. In *American Journal of Emergency Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.03.063>
- Setyaningsih, R. (2020). Akulturasi Budaya Jawa Sebagai Strategi Dakwah. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 5(01). <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2304>
- Siregar, D. (2016). Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Siste, K., Hanafi, E., Sen, L. T., Christian, H., Adrian, Siswidiani, L. P., Limawan, A. P., Murtani, B. J., & Suwartono, C. (2020). The Impact of Physical Distancing and Associated Factors Towards Internet Addiction Among Adults in Indonesia During COVID-19 Pandemic: A Nationwide Web-Based Study. *Frontiers in Psychiatry*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.580977>
- Su, Y., Xue, J., Liu, X., Wu, P., Chen, J., Chen, C., Liu, T., Gong, W., & Zhu, T. (2020). Examining the impact of covid-19 lockdown in Wuhan and Lombardy: A psycholinguistic analysis on weibo and twitter. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124552>
- Sulistyoko, A., & Hafidzi, A. (2020). Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*. <https://doi.org/10.36835/annuha.v7i1.327>
- Sumbulah, U. (2012). Islam Jawa dan Akulturasi Budaya: karakteristik, Variasi dan ketaatan ekspresif. *El-HARAKAH*. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2191>
- Susanto, E. (2016). Tembang Macapat Dalam Tradisi Islami Masyarakat Madura. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.682>
- Syahid, A. (2020). Living Hadith in the Practice of Distancing the Line (Ṣaff) in Congregational Prayers during Corona Pandemic. *Jurnal Living Hadis*. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2020.2284>



- Syarifudin, A. S. (2020). Impelementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua*. <https://doi.org/10.21107/metalingua.v5i1.7072>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicoho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Ulfiah, U., Kardinah, N. K. N., Hikmawati, F., & Rohman, U. (2020). Metode zikir sebagai upaya keluarga dalam menghadapi kecemasan pandemi Covid-19. *Unpublished*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Vaughan, A. (2020). Italy in lockdown. *New Scientist*. [https://doi.org/10.1016/s0262-4079\(20\)30520-0](https://doi.org/10.1016/s0262-4079(20)30520-0)
- Wahid, A. N., Sumarlam, , & Subiyantoro, S. (2018). Tradisi Ziarah Makam Bathara Katong (Tinjauan Deskripsi Akulturasi Budaya). *Mudra Jurnal Seni Budaya*. <https://doi.org/10.31091/mudra.v33i2.289>
- Wardoyo, C., & Sulaeman, A. (2017). Etnolinguistik Pada Penamaan Nama-Nama Bangunan di Keraton Yogyakarta. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 14(1), 55–76.
- Wekke, I. S. (2013). Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis. *Analisis*.
- Widiana, N. (2017). Budaya Lokal Dalam Tradisi “Nyumpet” di Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.2.1611>
- Widmer, M., Betran, A. P., Merialdi, M., Requejo, J., & Karpf, T. (2011). The role of faith-based organizations in maternal and newborn health care in Africa. In *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2011.03.015>
- Yusof, A., & Kastolani. (2016). Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Kontemplasi*.
- Zuhdi, M. H. (2017). Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya. *RELIGIA*. <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.122>

